

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA DI KECAMATAN  
NAINGGOLAN KABUPATEN  
S A M O S I R**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**LITA SITUMORANG  
198330116**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA DI KECAMATAN  
NAINGGOLAN KABUPATEN  
S A M O S I R**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**LITA SITUMORANG  
198330116**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA DI KECAMATAN  
NAINGGOLAN KABUPATEN  
S A M O S I R**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area



**OLEH:  
LITA SITUMORANG  
198330116**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir

Nama : Lita Situmorang

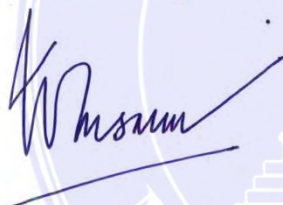
NPM : 198330116

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pemanding



Warsani Purnama Sari, SE,AK,CA,MM

Dr. Minda Muliana Br. Sebayang, SE,M.Si

Pembimbing

Pemanding

Mengetahui:



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

Ka.Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 Maret 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

### **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”** yang saya susun merupakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Maret 2024



Lita Situmorang  
198330116

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lita Situmorang  
NPM : 198330116  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 26 Maret 2024

Yang menyatakan

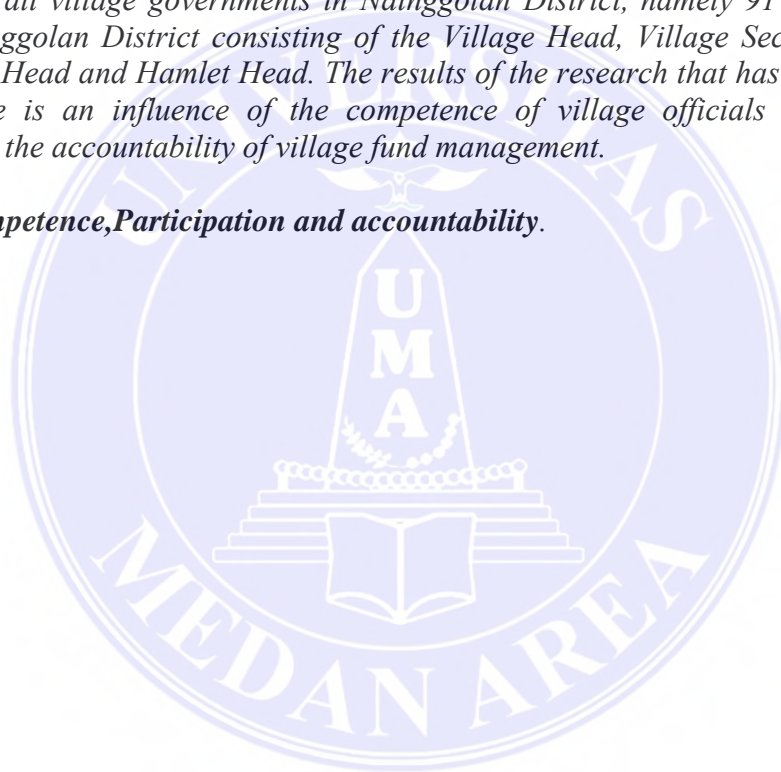


(Lita Situmorang)

## ABSTRACT

*This research aims to determine the influence of village officials' competence and community participation on management and village accountability in Nainggolan District, Samosir Regency. The design of this research is qualitative with a causal associative approach with secondary data types. Data sources in the research use primary data sources which are collected directly and processed by the researcher himself and directly from the research object. The data collection technique used in this research is using questionnaires. The data analysis technique in this research is multiple linear regression analysis. The population in this research is all village governments in Nainggolan District, namely 91 people from 13 villages in Nainggolan District consisting of the Village Head, Village Secretary, Finance Head, Planning Head and Hamlet Head. The results of the research that has been conducted show that there is an influence of the competence of village officials and community participation on the accountability of village fund management.*

**Keywords :** *Competence, Participation and accountability.*



## ABSTRAK

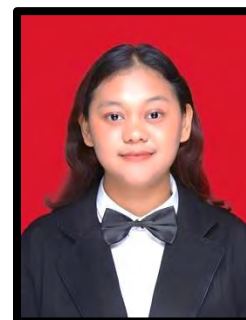
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa dan Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Desain Penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal dengan jenis data sekunder. Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan langsung dan diolah sendiri oleh peneliti dan langsung dari objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan media angket (kuesioner). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini seluruh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Nainggolan yaitu 91 orang dari 13 desa yang ada di Kecamatan Nainggolan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci : Kompetensi, Partisipasi dan Akuntabilitas**





## RIWAYAT HIDUP



Nama	Lita Situmorang
NPM	198330116
Tempat, Tanggal Lahir	Pandiangan, 30 Mei 2002
Nama Orang Tua	
Ayah	Parlen Situmorang
Ibu	Rosita Simbolon
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP N.1 Nainggolan
SMA/SMK	SMA Swasta Santo Mikhael Pangururan
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	Guru Les Privat Cici Aeng
No. HP/WA	082260577594
Email	<a href="mailto:Situmorang29@gmail.com">Situmorang29@gmail.com</a>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **“Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir”**.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Horns), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda,SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Dr. Minda Muliana Br. Sebayang, SE, M.Si,CA selaku dosen pembeding saya selama proses pengerjaan skripsi.
6. Ibu Fauziah Rahman,S.Pd, M.Ak selaku dosen sekretaris saya selama proses pengerjaan skripsi.
7. Kedua orangtua yang saya sayangi bapak saya Parlen Situmorang dan ibu saya Rosita Simbolon yang mendoakan dan memberikan dukungan penuh dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

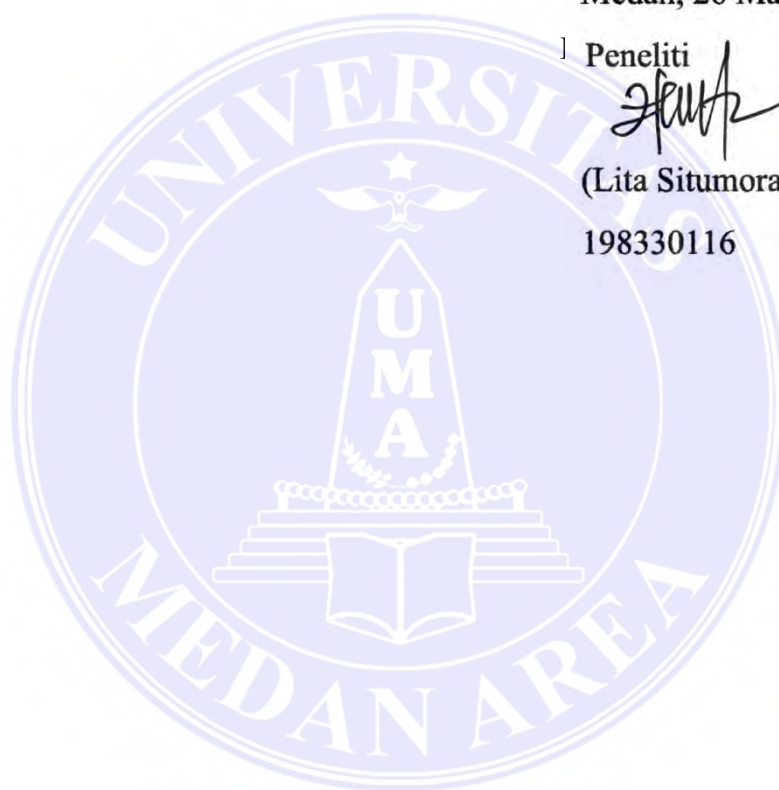
Medan, 26 Maret 2024

Peneliti



(Lita Situmorang)

198330116

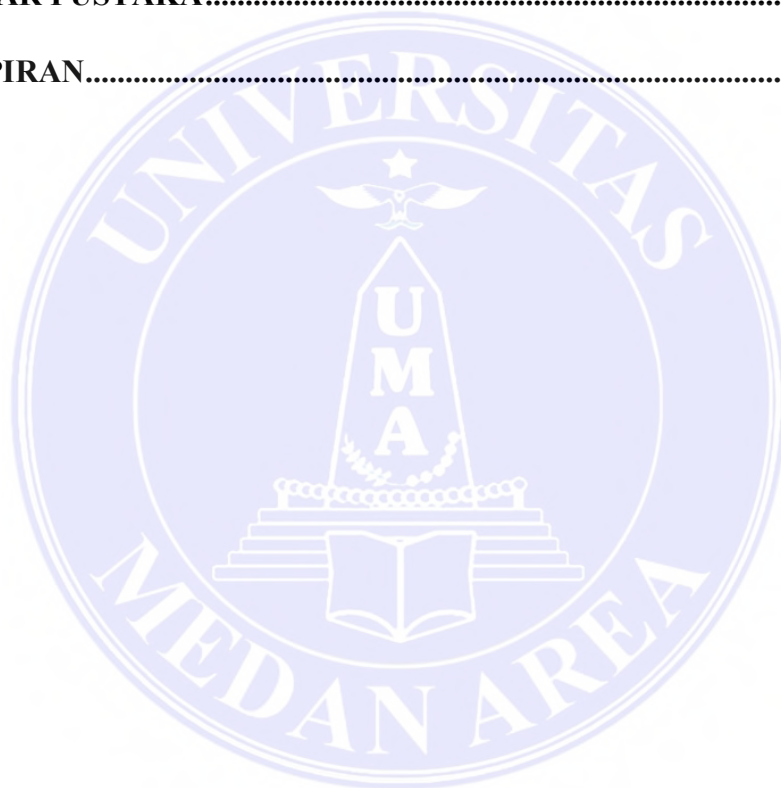


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ixx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xivv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	10
2.1.1.1 Pemerintah Desa .....	14
2.1.1.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	18
2.1.2 Kompetensi Aparatur Desa.....	19
2.1.2.1 Indikator Kompetensi Aparatur Desa .....	21
2.1.3 Partisipasi Masyarakat Desa.....	22
2.1.3.1 Indikator Partisipasi Masyarakat .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Konseptual .....	26
2.4 Hipotesis.....	27
2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	28
2.4.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	29
2.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Desain Penelitian .....	31

3.2	Objek dan Waktu Penelitian .....	31
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	32
3.4	Populasi dan Sampel.....	33
3.4.1	Populasi .....	33
3.4.2	Sampel .....	33
3.5	Instrumen Penelitian .....	34
3.5.1	Jenis Data.....	34
3.5.2	Sumber Data .....	34
3.5.3	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6	Metode Analisis Data .....	36
3.6.1	Uji Validitas.....	36
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	36
3.6.3	Uji Asumsi Klasik .....	36
3.6.3.1	Uji Normalitas .....	36
3.6.3.2	Uji Multikolineritas .....	37
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	37
3.7	Uji Hipotesis.....	38
3.7.1	Uji Parsial (Uji t) .....	38
3.7.2	Uji F (Uji Simultan).....	38
3.8	Uji Koefisien Determinasi.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>40</b>
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Nainggolan.....	40
4.2	Deskripsi Data .....	40
4.2.1	Profil Responden Berdasarkan Umur .....	41
4.2.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
4.2.3	Profil Responden Berdasarkan Jabatan .....	42
4.2.4	Profil Responden Berdasarkan Nama Desa.....	43
4.2.5	Analisis Deskriptif Kompetensi Aparatur Desa (X1).....	44
4.2.6	Analisis Deskriptif Partisipasi Masyarakat (X2).....	45
4.2.7	Analisis Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)....	47
4.3	Pengujian Hipotesis .....	49
4.3.1	Hasil Uji Validitas .....	49
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	51
4.3.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	53
4.3.3.1	Hasil Uji Normalitas.....	53
4.3.3.2	Hasil Uji Multikolineritas.....	54
4.3.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.3.4	Hasil Uji Hipotesis .....	57
4.3.4.1	Analisis Regresi Berganda .....	57
4.3.4.2	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	61
4.3.4.3	Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	62
4.3.4.4	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	63
4.4	Pembahasan/Diskusi.....	63
4.4.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Y) .....	63

4.4.2	Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Y) .....	64
4.4.3	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	65
4.4.4	Pembahasan .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>74</b>
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa di Kecamatan Nainggolan.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen Penelitian .....	32
Tabel 3.3 Daftar Desa & Jabatan Sampel Penelitian .....	34
Tabel 3.4 Bobot Skala Likert .....	35
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Umur .....	41
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Jabatan.....	42
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Nama Desa .....	43
Tabel 4.5 Respon Responden Terhadap Pernyataan Variabel X1 .....	45
Tabel 4.6 Respon Responden Terhadap Variabel X2 .....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1).....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X2).....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas .....	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Berganda .....	58
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Probability Plot .....	54
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatter Plot .....	56





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	80
Lampiran 2. Tabel Tabulasi .....	84
Lampiran 3. Hasil Output Penelitian.....	99
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian .....	93



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggung jawaban tersebut. Napisah & Taufiqurachman (2020, 80) mengatakan bahwa akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih atas pilihan-pilihannya dan tindakannya.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015,9), Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Zulaifah & Marwata, 2020, 132).

Desa mempunyai peran untuk mengatur urusannya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan wewenangnya sebuah desa memiliki unsur penyelenggaraannya yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan aparat-aparat desa lainnya. Pemerintah desa bertugas mengurus pemerintahan yang menyangkut pembangunan desa dan masalah desa.

Menurut Pratiwi & Dewi (2021, 184), wujud nyata yang perlu diciptakan dalam membantu dan meningkatkan pembangunan desa adalah terus berupaya meningkatkan pengalokasian dana pada setiap desa. Mengelola keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, dan partisipatif juga di jalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. dikarenakan kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Kepedulian Pemerintah terhadap desa dan masyarakat dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa di Kecamatan Nainggolan**

Tahun	Jumlah Anggaran/Tahun (Rp)
2019	957.955.000
2020	1.444.637.000
2021	1.512.029.000
2022	1.677.307.000

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan anggaran dana desa di kecamatan Nainggolan yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan anggaran dana desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal. Menurut data IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Nainggolan dari 13 Desa yang ada dikecamatan Nainggolan, terdapat 8 desa maju atau setara dengan 61,6% dan desa tersebut yaitu Desa Nainggolan, Parhusip1, Sinaga Uruk Pandiangan, Pasaran1, Sipinggan, Janji Marapot, Sibonor Ompu Ratus dan Sipinggan lumban siantar. Dari 8 desa diatas dapat dikatakan menjadi desa maju atau desa Pra-sembada yaitu desa yang masyarakatnya dinilai mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa baik dari sumber daya alam maupun fasilitas yang disediakan. Sedangkan ada terdapat 5 desa atau setara dengan 38,4% desa tertinggal yakni yaitu Desa Huta Rihit, Toguan Galung, Pananggangan 1, Pananggangan2, Pasaran Parsaoran. Desa tersebut dikatakan tertinggal karena mengalami permasalahan dalam proses perkembangan desa baik dari sektor

ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan, pembangun infrastruktur desa dan faktor lain yang mempengaruhinya.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan merata. Berdasarkan UU tersebut serta keadaan realita di kecamatan Nainggolan, masih terdapat desa yang tidak berkembang sebanyak 5 desa atau 38,4%, dimana data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih belum melaksanakan pembangun desa dengan baik dan belum optimal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, penelitian terdahulu yang dilakukan Umaira & Adnan (2019) dan Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro (2020) telah menemukan bahwa terdapat beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi yakni kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terkait dengan pengelolaan dana desa, maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang akuntabel. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal.

Selain di terbitkan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah juga menertibkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa yang diharapkan dapat menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Dimana sesuai ketentuan tersebut semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Untuk pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik pemerintah desa harus lebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Raharjo (2020, 46) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dalam hal ini, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan kekuatan dan partisipasi masyarakat desa juga harus besar dalam ikut serta dalam pengelolaan dana desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Salah satu kritisnya pengelolaan dana desa adalah pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Besarnya dana desa yang ditransfer APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena rawan terjadi penyalahgunaan dana desa apalagi kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan untuk membahas anggaran dana desa dalam rapat desa, sehingga masyarakat awam memiliki kekhawatiran yang sangat kuat terhadap dana desa yang

dianggarkan. Pada dasarnya prinsip akuntabilitas di setiap desa kurang diperhatikan sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat (Aryani, 2020; Fauzi, 2018). Kualitas aparatur desa sendiri harus dapat dipastikan menjalankan sumber daya manusia sebaik mungkin guna upaya membantu pencapaian dari desa tersebut. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sendiri, yang pertama kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja atau perilaku (Purba, dkk, 2021, 162).

Faktor yang kedua partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasin tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Teesen, 2016, 2). Menurut Pratiwi & Dewi (2021, 185), banyaknya jumlah program kerja desa menyebabkan para aparat desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam membantu aparat desa melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Masyarakat bisa disebut juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi public, terutama implementasi

pembangunan di desa-desa. Implementasi pembangunan harus diprioritaskan dengan melibatkan masyarakat sehingga proses implementasi tepat pada sasaran.

## 1.2 Perumusan Masalah

- 1) Menurut data IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Nainggolan dari 13 Desa yang ada di kecamatan Nainggolan, terdapat 8 desa berkembang dan 5 desa tertinggal atau setara dengan 38,4% desa yang mengalami permasalahan dalam proses perkembangan desa baik dari sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan, pembangun infrastruktur desa dan faktor lain yang mempengaruhinya.
- 2) Berdasarkan informasi tersebut, terdapat beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi yakni kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada yang sudah peneliti sajikan, maka terdapat pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang ada di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa yang ada di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir?



3. Apakah kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pertanyaan penelitian diatas, maka peneliti merumuskan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berikut ini manfaat penelitian yang peneliti harapkan:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas dana Desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu bagi peneliti

- b) Bagi Instansi

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi dan masukan terhadap akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat melanjutkan serta dengan melengkapi kekurangan untuk penelitian selanjutnya.

3) Manfaat dari segi kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan kebijakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*accountability*”, yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban (Paranoan,dkk 2022, 51). Akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015,9), akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan dana desa yang di jalankan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015, 35), menjabarkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asa-asas pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

#### 1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara berjangka meliputi:

- a. Pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 1 tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDes dalam APBDes tahun berkenaan kemudian penyampaian tersebut disampaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan untuk dibahas dan disepakati bersama.

## 2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penat usahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen umum seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 dan 36 yaitu:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
- c. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### 4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Pelaporan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pasal 37, yaitu:

a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, berupa:

- 1) Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan juli pada tahun berjalan.
- 2) Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun dalam pelaksanaan realisasinya paling lambat disampaikan pada akhir bulan bulan pada tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah pemerintah yaitu Bupati/Walikota. serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah di-update masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggung jawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Agustiana (2020, 7), dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota ke APBDes, dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. pengelolaan desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai pertanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

#### **2.1.1.1 Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan dibidang penyelenggaraan dipemerintah

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat, kewenangan pemerintah desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan local berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak asal usul merupakan hak yang menjadi warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakat, kelembagaan, pranata, hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindak lanjuti Bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur



yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, Ketua Dusun, dan Badan Permusyawaratan Masyarakat.

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Kebijakan tentang APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Mentetapkan Petugas yang yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
- d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan paling lama menjabat selama 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut-turut. Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris desa sebagai kordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa sedangkan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.

## 3. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penata usahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap kahir bulan ssecara tertib.

d. Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dan menyiapkan kebijakan pemerintah desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 2.1.1.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Shafira & Utami (2021, 1031), menyebut bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah diharapkan bersifat transparan yaitu dengan memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka seperti dalam setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus didukung oleh bukti yang sah.

2. Kepatuhan dalam pelaporan

Laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi informasi yang memadai sesuai dengan UU yang berlaku agar tidak menimbulkan fraud yaitu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja

untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain.

3. Kesesuaian prosedur

Pemerintah desa mengikuti prosedur yang ada dalam penyusunan laporan keuangan dengan jumlah yang telah ditentukan dan arahan yang diterima pada saat bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Kecukupan informasi

Penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa disajikan secara lengkap dan tanpa tertinggal dari informasi yang sudah didapatkan untuk penyusunan laporan.

5. Ketetapan penyampaian laporan keuangan

Pemerintah desa tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

### 2.1.2 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014) (Ramdani, et al., 2022, 74). Dari defenisi diatas, terdapat tiga hal pokok yang mencakup dalam kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja atau perilaku. Kompetensi selalu tampil dalam bentuk kinerja atau perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi atau diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.
3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi merupakan aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil atau efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif yang tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Menurut Perdana (2018) dalam Fitriani, Yuliani, & Purwantini (2021, 334), dijelaskan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal. Putri (2020, 12) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek, untuk itu dalam pelaksanaannya

aparatur desa harus mempunyai kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, sebab ini merupakan bentuk tanggungjawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa.

### 2.1.2.1 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Nurkhasanah (2019) dalam Putri, (2020, 18) menjelaskan variabel kompetensi aparatur desa yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman

Kompetensi aparatur desa harus memahami tentang pengelolaan dana desa.

2. Keahlian teknis

Kompetensi aparat desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.

3. Pelatihan

Aparatur desa diharapkan mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

4. Inisiatif dalam bekerja

Aparat desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.

5. Kode Etik Kepegawaian

Aparat desa bekerja harus mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai.

### 2.1.3 Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Dapla & Gosal (2018, 2) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah penyelenggara pemerintah desa yang mengikut sertakan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. Partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan (Bhinadi, 2017, 29).

Selain itu, Surat (2020, 34) mengatakan bahwa partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Dalam Bhinadi,(2017,29-30), dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat desa diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara swakelola oleh desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

3. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa melalui yang dilakukan melalui musyawarah desa.
5. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara parrtisipatif oleh masyarakat desa.

### 2.1.3.1 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Surat(2020,34) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilohat berdasarkan indikator tersebut:

1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat.

Indikator ini mengacu pada keberadaan struktur atau wadah yang memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok tersebut dapat berupa organisasi atau forum yang diakui secara resmi dalam desa. Misalnya, sebuah komite pembangunan desa, kelompok tani, atau lembaga kemasyarakatan yang terbuka bagi partisipasi masyarakat. Keberadaan kelompok-kelompok ini penting karena mereka menyediakan jalur bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa.



2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat tentang masalah-masalah yang dihadapi desa, kemampuan mereka untuk mengidentifikasi solusi yang potensial, dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan perencanaan.

3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Indikator ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengemukakan pendapat, ide, dan masukan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti musyawarah desa, pertemuan komunitas, atau forum terbuka lainnya. Kegiatan ini harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara tentang prioritas pembangunan desa, masalah yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yaitu yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berikut ini peneliti sajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ekasari Sugiati dan Ivan Yudianto (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.
3	Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemahaman aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

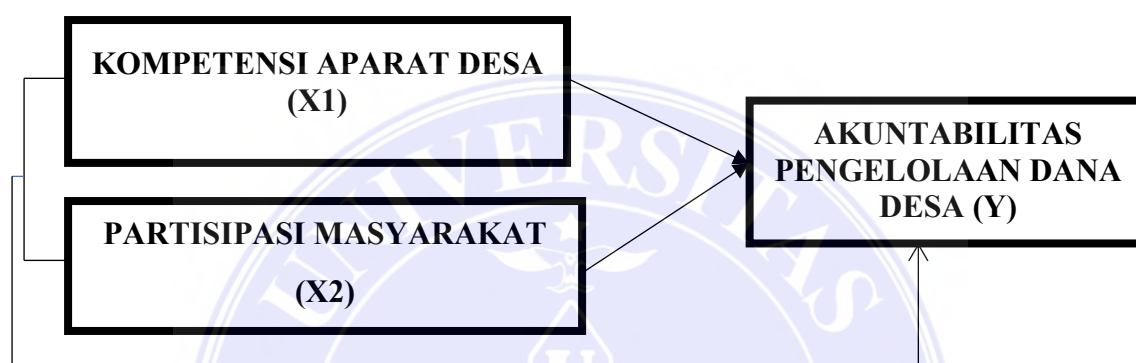
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	Terdapat pengaruh kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6	Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, Suhenro (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8	Romy Dwi Putra (2021)	Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Intern, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Intern, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel *independen* (bebas) dengan variabel *dependen* (terikat) yang diamati atau diukur ataupun diteliti melalui penelitian yang dilakukan (Iriani,dkk2022, 63). Dalam kerangka konseptual, peneliti membuat suatu hubungan mengenai bagaimana Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa secara parsial maupun simultan, dengan alasan peneliti akan mendapatkan detail mengenai karakteristik variabel yang akan diteliti nantinya.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 diatas yang menggambarkan variabel *dependen* maupun variabel *independen*. Pada variabel ini terdapat dua variabel *independen* yaitu Kompetensi Aparat Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2), sedangkan variabel *dependen* dalam penelitian ini satu yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap variabel *dependen*, apakah variabel *independen* pada penelitian ini mempengaruhi variabel *dependen*.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pernyataan (Yusuf, 2014, 130). Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

#### **2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi aparatur merupakan bagian dari aspek pribadi seorang pekerja yang memungkinkan seorang pekerja yang mencapai kinerja yang baik. Aspek pribadi yang mencakup sikap, motif, sifat, pengetahuan dan keterampilan karena kompetensi akan mengarahkan tingkah laku dan tingkah laku juga yang akan menghasilkan bagaimana kinerja. Kompetensi dari aparatur menjadi suatu faktor penghambat dari pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, dengan rendahnya kualitas, monitoring dan evaluasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, sehingga belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel.

Menurut penelitian Mada,dkk(2017), yang menguji pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

$H_1$  : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2.4.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi desa merupakan keterlibatan aktif masyarakat d alam proses penentuan arah dari strategi pembangunan yang dilaksanakan oeh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel karena masyarakat bisa disebut menjadi pemangku kepentingan utama dalam kebijakan organisasi publik dan terutama dalam implementasi pembangunan desa.

Menurut penelitian Pratiwi dan Dewi (2021) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang dengan hasil menunjukan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H<sub>2</sub> : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **2.4.3 Pengaruh Kompentensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilis Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat adalah hal yang sama kaitannya dalam pengelolaanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Penelitian Putra(2021) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh kompetensi pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

bahwa kompetensi pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H<sub>3</sub> : Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asosiatif kausal. Penelitian kausal adalah penelitian dimana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 91).

#### 3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah pemerintah desa kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2022, berikut ini peneliti sajikan rincian waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2022		2023				2024	
		Okt	Nov-Des	Jan	Feb-Apr	Mei	Jun-Des	Jan	
1	Pengajuan Judul								
2	Pembuatan Proposal								
3	Revisi Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
7	Interpretasi Data								
8	Seminar Hasil								

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023



### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Santoso & Madiisriyatno (2021, 42), operasional variabel adalah untuk mendefinisikan variabel penelitian, menentukan indikator-indikator dan menentukan skala pengukuran, dengan demikian pengukuran yang dilakukan menjadi objektif. Dalam memperoleh data yang berkaitan dengan variabel bebas dan terikat dipergunakan lembar pernyataan yang ditunjukkan kepada responden. Pernyataan merupakan pengembangan dari indikator-indikator yang disusun sedemikian rupa oleh penulis yang disertai dengan kolom jawaban dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan skor ordinal (data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, tetapi posisi data tidak sama dengan derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat). Berikut ini peneliti sajikan definisi operasional dan instrumen dalam penelitian ini:

**Tabel 3.2**  
**Defenisi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan dalam berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal.	1.Pemahaman. 2.Keahlian Teknis. 3.Pelatihan. 4.Inisiatif dalam bekerja. 5.Kode etik kepegawaian.	Likert 1-5
2	Partisipasi Masyarakat (X2)	Penyelenggaraan masyarakat desa yang mengikut sertakan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah.	1.Adanya kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat 2.Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses	Likert 1-5

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
			3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.	
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.	1. Kejujuran dan keterbukaan informasi. 2. Kepatuhan dan pelaporan. 3. Kesesuaian prosedur. 4. Kecukupan informasi. 5. Ketetapan penyampaian laporan keuangan.	Likert 1-5

Sumber: Putri, 2020; Surat, 2020; Shafira & Utami, 2021;

Data Olahan Peneliti, 2023

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Menurut Santoso & Madiisriyatno (2021, 121), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa di Kecamatan Nainggolan yang terdiri dari 91 perangkat desa.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel dari penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampel* yaitu sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel (Santoso &

Madiisriyatno, 2021, 121). Sampel dari penelitian ini terdiri dari 91 orang, dengan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Daftar Desa & Jabatan Sampel Penelitian**

No	Nama Desa	Susunan Organisasi							
		Kades	Sekdes	Kaur Keu.	Kaur Perenc	Kadus			Jlh
1	Pangaloan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
2	Huta Rihit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
3	Sinaga Uruk Pandiangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
4	Toguan Galung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
5	Pananggangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
6	Pasaran Parsaoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
7	Sipinggan Lbn Siantar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
8	Sibonor Ompu Ratus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
9	Nainggolan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
10	Pasaran 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
11	Pananggangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
12	Sipinggan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
13	Janji Marapot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
Total									91

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

### 3.5 Instrumen Penelitian

#### 3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber langsung atau tempat objek penelitian dilakukan.

#### 3.5.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan langsung dan diolah langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang sudah

ditetapkan oleh peneliti tersebut. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

### 3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan media angket (kuisisioner). Menurut Santoso & Madiisriyatno (2021, 158) kuisisioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis dan diberikan kepada responden untuk dijawab, yang kemudian dijawab sesuai dengan pendapat responden. Kuisisioner disebar kepada 91 responden dan peneliti menggunakannya sebagai sampel. Pada pengumpulan data ini, dalam mengukur pendapat responden menggunakan Skala Likert yang dimulai dari angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) hingga 1 untuk Pendapat Sangat Tidak Setuju (STS). Perinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Bobot Skala Likert**

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Santoso & Madiisriyatno, 2021

## 3.6 Metode Analisis Data

### 3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang valid artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat diukur secara tepat atau valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan atau pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang sudah didapat memiliki nilai signifikan dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh valid (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 131).

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang mengenai pertanyaan kuisisioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reabilitas menggunakan Uji *Alpha Cronbach*. Apabila *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 maka instrumen penelitian dapat dikatakan *reliable*, sebaliknya apabila nilai *cronbach* lebih kecil dari 0,6 maka instrumen penelitian tidak *reliable* (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 138).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik yaitu nilai yang memiliki distribusi normal, jadi uji normalitas ini bukan dilakukan pada variabel masing-masing

variabel namun nilai residualnya (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 91). Dalam pengujian normalitas ini, peneliti menggunakan *one-sample kolmogrof smirnov*, Uji P Plot dan Histogram. Dimana pengujian *one Sample kolmogorov -smirnov* ialah jika data menunjukkan nilai signifikan  $> 0,05$  maka data ditribusi normal.

Uji normalitas yang menunjukan P-plot yaitu suatu variabel dikatakan normal jika gambar dari distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal dan grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell sheped*), tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 170).

### 3.6.3.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel *independen* (tidak terjadi multikolineritas). Uji Multikolineritas dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolineritas adalah mempunyai VIF yang lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tokerance lebih besar dari 0,1 (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 172).

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama dengan semua pengamatan didalam model regresi, regresi yang tidak baik terjadinya heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas

menggunakan Grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu ZPRED (sumbu X) dengan residualnya SRESID (sumbu Y). Apabila titik-titik, menyebar secara acak dan tersebut baik angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 192).

### **3.7 Uji Hipotesis**

#### **3.7.1 Uji Parsial (Uji t)**

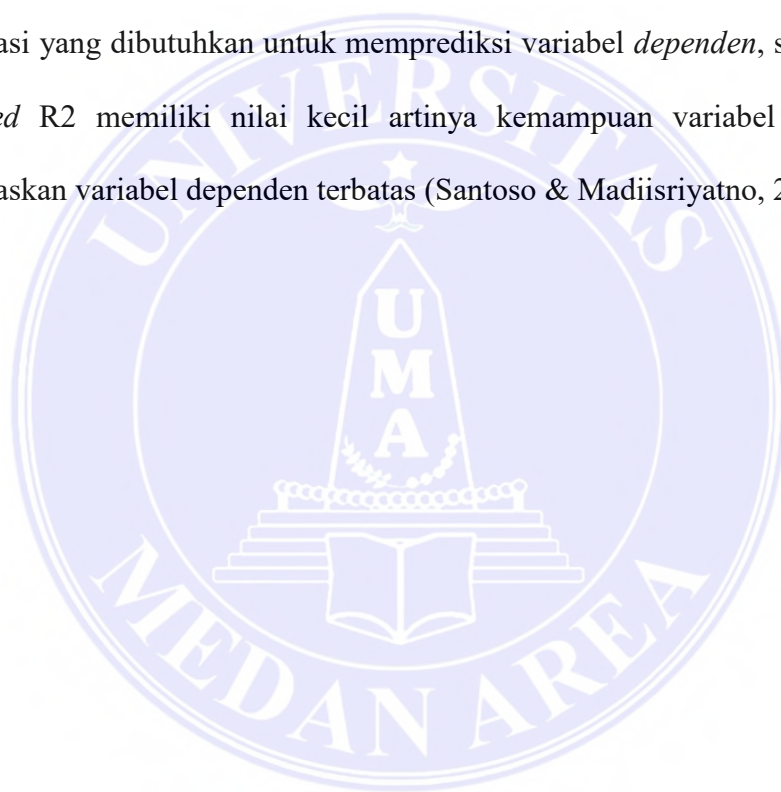
Uji t menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan. Penelitian ini menggunakan uji t untuk menguji hipotesis dimana jika variabel independen memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,5 terhadap variabel dependen maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis penelitian dapat di terima (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 100).

#### **3.7.2 Uji Simultan (Uji F)**

Uji F bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji. Uji F dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dasar Pengambilan keputusan dalam uji f untuk analisis regresi adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05 (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 273).

### 3.8 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemamouan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini koefisien determinasi dapat dilihat dari besarnya nilai yang mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika pada nilai *Adjusted R2* memiliki nilai besar berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependen*, sedangkan jika *Adjusted R2* memiliki nilai kecil artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen terbatas (Santoso & Madiisriyatno, 2021, 193).





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa :

- 1 Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.
- 2 Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.
- 3 Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir

#### 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan desa sebaiknya meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur desa.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa perlu diupayakan melalui berbagai mekanisme partisipasi yang efektif.
3. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, seperti budaya organisasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V. (2020). Ppengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu (Studi Pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi). *Akuntansi Pemerintahan: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 88-108.
- Aryani, I. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-kecamatan Kajoran)*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah .
- Dapla, N., & Gosal, R. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Debula Kecamatan Kwelamduda Kabupaten Yahukimo). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-11.
- Fauzi, A. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fitriani, Y., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2021). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang). *Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 331-346.
- Iriani, N., Dewi, G., Sudjud, S., Talli, A., Surlanti, Setyowati, R., . . . Nuraya, T. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Goodwill: Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 106-115.
- Mustofa, S. (2020). *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa: Dari Sabang Sampai Merauke*. Bogor: Guepedia.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 79-88.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.

Paranoan, S., Herawati, T., Yanuarisa, Y., Kantohe, M., Usman, E., Prihandani, N., . . . Bulutoding, L. (2022). *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.

*Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 Tahun 2014*. (n.d.).

Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *IJBA: Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183-198.

Purba, S., Subakti, H., Cendana, W., Cecep, H., Simarmata, W. F., Tanjung, R., . . . Avicenna, A. (2021). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Putra, I., & Rasmini, N. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.

Putri, D. K. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Raharjo, M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ramdani, A., Sumarni, Yuliana, Saleh, L. F., Junaidin, Tauhid, . . . Razak, M. R. (2022). *Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Romy, D. P.,(2021).*Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa,Sistem Pengendalian Intern Partisipasi Masyarakat Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang

Santoso, I., & Madiisriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Indigo Media.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Urecol*, 205-210.

Shafira, A. Y., & Utami, E. R. (2021). Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1025-1040.

- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 580-590.
- Surat, T. L. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 31-41.
- Teesen, G. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1-17.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471-481.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 130-141.



## 2.4.4 Lampiran 1. Kuesioner

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi formulir dibawa :

Nama :

Usia :

**Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan data diri anda :**

<b>Jenis Kelamin :</b>	<b>Pendidikan :</b>	<b>Jabatan :</b>	<b>Masa Jabatan :</b>
<input type="checkbox"/> Laki - laki	<input type="checkbox"/> SMA	<input type="checkbox"/> Kepala Desa	<input type="checkbox"/> < 5 tahun
<input type="checkbox"/> Perempuan	<input type="checkbox"/> S1	<input type="checkbox"/> Sekretaris Desa	<input type="checkbox"/> 5-10 tahun
		<input type="checkbox"/> Bendahara Desa	<input type="checkbox"/> > 10 Tahun
		<input type="checkbox"/> Kepala Urusan tata usaha	
		<input type="checkbox"/> Kepala Urusan Perencanaan	
		<input type="checkbox"/> Kepala Dusun	

### B. Profil Desa

1. Nama Desa : .....
2. Alamat Desa : .....
3. Nomor Telepon/Hp : .....
4. Lama Berdiri : .....

....., ... Juni 2023

Responden,

.....  
.....

### C. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan yang sebenarnya dirasakan atau dialami dengan cara mengisi pada kolom yang telah disediakan dan memberi tanda silang (X) pada kolom yang tersedia di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

- |   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | = Sangat Tidak Setuju (STS) | 4 | = Setuju (S)         |
| 2 | = Tidak Setuju (TS)         | 5 | = Sangat Setuju (SS) |
| 3 | = Netral (N)                |   |                      |

### DAFTAR PERNYATAAN

#### VARIABEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
	<b>A.Kejujuran dan Keterbukaan Informasi</b>					
1	Pengelolaan keuangan dana desa disusun secara jujur, terhindar dari penyalahgunaan jabatan dan sesuai dengan hukum.					
2	Pengelolaan dana desa disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat					
3	Realisasi dana desa selalu diinformasikan melalui pembuatan spanduk/baliho					
	<b>B.Kepatuhan dan Pelaporan</b>					
1	Dalam penyusunan laporan keuangan desa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku					
	<b>C.Kesesuaian Prosedur</b>					
1	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa selalu dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang desa.					



	<b>D.Kecukupan Informasi</b>					
1.	Penyusunan laporan pertanggung jawaban disajikan secara lengkap tanpa ada yang tertinggal dari informasi yang didapatkan					
	<b>E.Ketetapan Penyampaian Laporan Keuangan</b>					
1.	Pengumuman tentang penyaluran dana desa selalu bisa didapat setiap waktu.					

### VARIABEL KOMPETENSI APARAT DESA

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TD	N	S	SS
	<b>A.Pemahaman</b>					
1	Tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas merupakan hal yang harus dipahami					
2	Pengetahuan akan teknologi informasi menunjang kemampuan dalam bekerja					
	<b>B.Keahlian Tehnis</b>					
1	Aparatur Desa mampu untuk menyusun dan meyajikan laporan keuangan dengan baik					
	<b>C.Pelatihan</b>					
1	Aparatur desa dapat meningkatkan pengetahuannya dengan pelatihan-pelatihan teknis terkait dengan pengelolaan dana desa dan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa					
	<b>D.Inisiatif dalam Bekerja</b>					
1	Aparatur Desa dapat memecahkan masalah,bertindak secara efektivitas dan memiliki kesadaran diri dalam pekerjaan yang dilakukan					

	<b>E.Kode Etik Kepegawaian</b>					
1	Memiliki tanggung jawab sosial dalam kepentingan public					

### Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
	<b>A.Adanya Suatu Kelompok Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat</b>					
1	BPD harus siap bersedia menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan partisipasi masyarakat kepada pemerintah desa					
2	Pemerintah desa harus mendukung segala partisipasi masyarakat desa untuk kemajuan desa					
	<b>B.Kemampuan Masyarakat Terlibat Dalam Proses</b>					
1	Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa					
	<b>C.Kegiatan Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat</b>					
1	Adanya wadah dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance					
2	Adanya Perkumpulan rutin masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya masing masing					

## 2.4.5 Lampiran 2. Tabel Tabulasi

### Tabulasi dan Jawaban Responden

#### Variabel Bebas (X1) Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi Aparatur Desa							
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total X1
1	4	4	3	5	4	4	24
2	4	3	4	5	4	5	25
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	4	25
5	4	5	5	5	5	5	29
6	5	4	4	4	4	4	25
7	5	5	5	4	5	5	29
8	4	4	4	5	5	4	26
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	5	4	4	25
11	5	4	5	5	4	4	27
12	4	5	5	5	4	4	27
13	4	4	5	4	4	4	25
14	4	4	4	5	4	4	25
15	4	4	4	4	4	4	24
16	5	4	4	4	4	4	25
17	4	4	4	4	5	5	26
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	5	5	26
20	5	4	4	4	4	4	25
21	4	4	4	4	4	5	25
22	4	4	4	5	4	4	25
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	4	4	4	5	25
28	5	4	4	4	4	4	25
29	5	5	5	4	4	4	27
30	5	4	4	4	4	4	25
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	5	5	4	4	4	26
33	4	4	5	5	4	4	26

34	5	5	4	4	4	4	26
35	4	5	4	4	5	4	26
36	4	4	5	5	5	5	28
37	5	3	3	4	4	5	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	5	5	5	27
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	5	4	4	4	25
44	4	4	4	5	4	5	26
45	4	4	4	4	4	5	25
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	3	5	5	25
49	4	4	4	5	4	4	25
50	5	4	5	5	4	4	27
51	4	4	4	5	4	5	26
52	4	4	5	4	3	5	25
53	5	4	5	4	4	5	27
54	5	4	3	5	2	5	24
55	4	4	4	5	4	4	25
56	4	5	4	3	3	5	24
57	5	5	4	4	5	4	27
58	5	4	4	5	4	5	27
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	4	5	5	5	5	29
61	5	5	5	5	5	5	30
62	4	5	4	4	4	4	25
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	5	5	5	4	4	27
65	5	5	5	4	4	4	27
66	4	4	4	4	4	4	24
67	5	5	4	4	4	4	26
68	5	4	5	4	4	4	26
69	4	4	4	5	5	5	27
70	5	5	5	4	4	4	27
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	4	4	4	4	26
73	4	4	4	4	4	5	25
74	5	5	5	5	5	5	30

75	4	4	4	4	4	4	24
76	5	5	5	4	4	4	27
77	5	5	4	4	4	4	26
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24
85	4	4	3	3	5	4	23
86	4	3	3	4	4	4	22
87	4	5	4	3	5	4	25
88	4	5	4	5	5	4	27
89	5	5	4	4	4	4	26
90	4	3	3	5	5	5	25
91	5	5	5	5	5	5	30

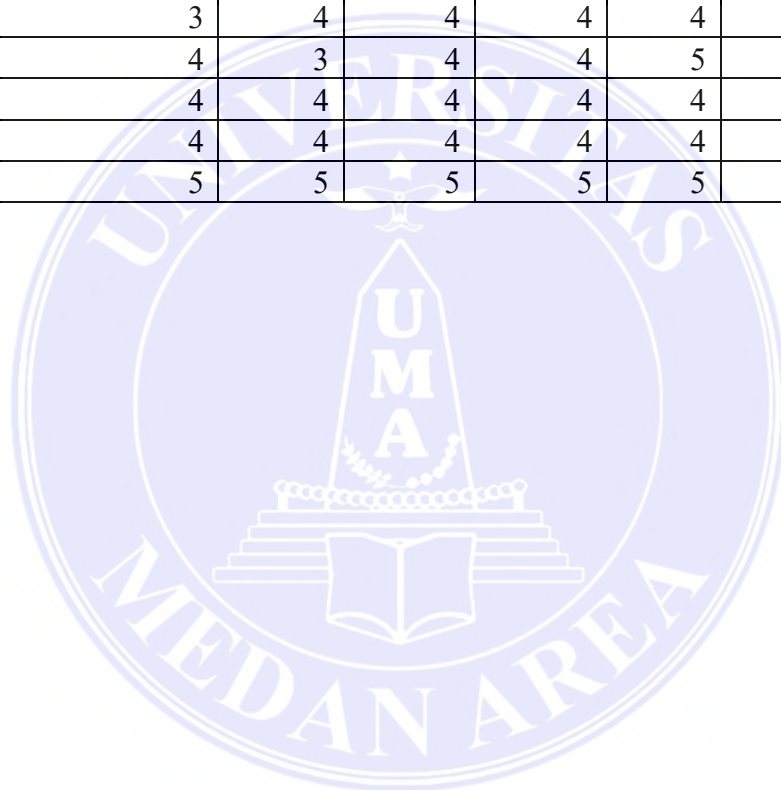
### Tabulasi Dan Jawaban Responden

#### Variabel bebas (X2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat							
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total X2
1	4	5	4	4	5	5	27
2	5	5	3	4	3	3	23
3	5	4	4	4	4	4	25
4	5	4	4	4	4	4	25
5	4	5	5	5	4	4	27
6	5	4	4	4	4	4	25
7	5	4	4	4	4	4	25
8	4	4	4	4	5	5	26
9	4	4	4	4	4	3	23
10	3	4	4	4	3	3	21
11	5	5	4	4	4	4	26
12	4	3	5	5	4	5	26
13	4	4	4	4	4	3	23
14	4	4	4	4	4	3	23
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	5	3	4	24
17	4	4	4	4	3	4	23
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	5	4	4	4	4	26
20	4	4	5	4	4	4	25
21	4	4	5	4	4	4	25
22	4	4	4	4	4	5	25
23	4	4	5	5	5	5	28
24	4	4	4	4	4	5	25
25	4	4	5	5	5	5	28
26	4	4	4	4	4	4	24
27	6	4	4	4	4	5	21
28	4	4	4	4	4	5	25
29	4	5	5	5	5	5	29
30	5	5	4	4	4	4	26
31	4	4	5	5	4	4	26
32	4	4	4	4	4	5	25
33	4	4	4	5	5	5	27
34	4	5	5	5	4	4	27
35	4	4	4	4	4	4	24

36	5	5	5	5	5	4	29
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	5	25
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	5	4	4	4	25
43	5	4	3	3	5	4	24
44	4	4	3	3	4	4	22
45	5	4	4	4	4	4	25
46	4	4	4	4	4	4	24
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	3	4	3	2	3	4	19
51	4	5	5	5	5	4	28
52	5	4	5	5	4	4	27
53	4	5	4	5	5	5	28
54	3	5	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	5	5	4	4	4	4	26
57	5	5	5	5	5	5	30
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	5	5	5	5	28
61	4	4	4	4	5	4	25
62	5	4	5	4	4	5	27
63	5	4	5	5	4	4	27
64	4	4	4	4	5	5	26
65	5	4	4	4	4	4	25
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	4	4	4	24
68	5	5	4	5	5	4	28
69	5	4	4	4	4	4	25
70	4	4	5	5	4	4	26
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	4	4	4	4	5	25
75	4	4	4	4	4	5	25
76	4	4	4	4	4	4	24

77	5	5	5	5	5	5	30
78	4	5	4	4	5	3	25
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24
85	5	5	4	4	4	4	26
86	4	4	4	4	4	4	24
87	3	4	4	4	4	4	23
88	4	3	4	4	5	4	24
89	4	4	4	4	4	4	24
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	5	5	5	30





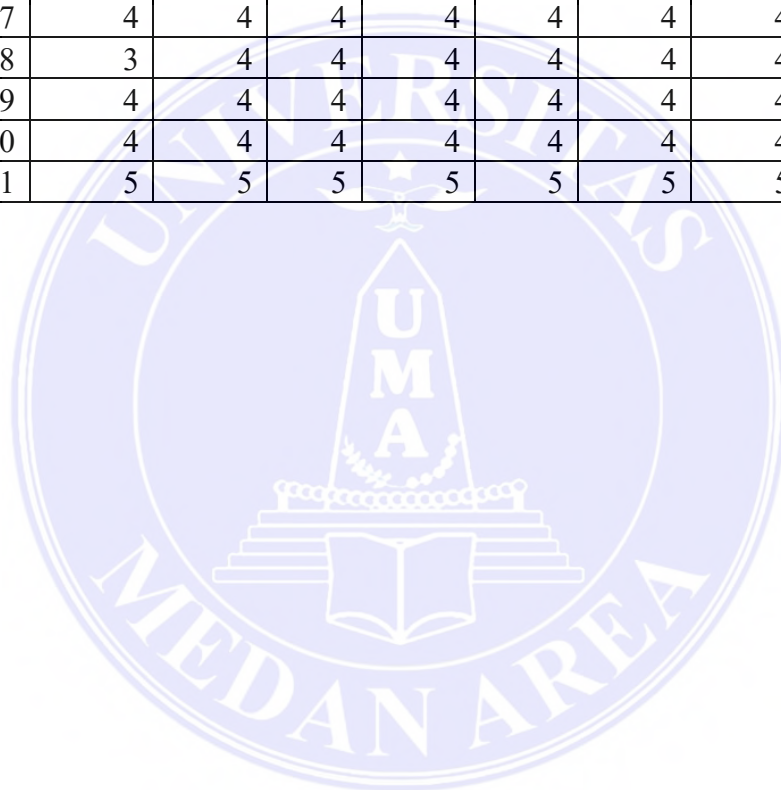
### Tabulasi dan Jawaban Responden

#### Variabel Terikat(Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa								
No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Total Y
1	5	4	4	4	4	5	5	31
2	4	4	3	4	4	4	3	26
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	5	5	4	34
6	5	5	5	5	4	5	5	34
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	4	4	4	4	4	4	5	29
9	4	4	4	5	4	4	4	29
10	5	5	5	5	5	4	4	33
11	5	4	5	4	4	5	4	31
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	4	5	5	5	4	4	4	31
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	5	4	4	4	29
20	4	5	4	4	4	4	4	29
21	4	4	4	5	4	4	4	29
22	4	3	4	4	4	4	5	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	4	4	4	4	5	4	30
25	5	4	5	5	4	4	4	31
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	4	4	4	4	4	4	29
28	4	4	4	4	5	4	4	29
29	4	4	4	5	4	4	4	29
30	4	4	4	5	4	5	4	30
31	4	4	4	4	5	4	4	29
32	4	4	5	5	5	5	4	32
33	4	4	4	4	4	4	5	29
34	4	4	4	5	4	4	4	29
35	5	5	4	4	4	4	5	31

36	5	5	5	4	4	5	5	33
37	4	5	5	5	4	5	5	33
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	5	5	5	5	5	5	5	35
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	4	4	4	4	4	4	5	29
44	5	5	5	5	5	5	5	35
45	4	4	4	5	5	5	5	32
46	5	5	5	5	5	5	5	35
47	5	5	5	5	4	3	4	31
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	5	5	5	5	5	2	4	31
51	5	4	5	5	5	4	4	32
52	5	5	5	5	4	4	4	32
53	4	5	5	5	5	5	5	34
54	5	5	5	5	5	4	5	34
55	5	4	4	4	5	4	4	30
56	5	4	5	5	4	3	5	31
57	5	5	5	4	4	5	5	33
58	5	5	4	5	5	5	5	34
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	5	5	5	5	4	5	4	33
61	4	4	4	4	4	4	4	28
62	5	4	5	4	4	4	4	30
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	5	5	4	4	4	5	4	31
65	4	5	5	4	4	4	5	31
66	5	4	5	5	5	5	4	33
67	5	4	5	5	5	5	5	34
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	5	4	4	4	4	4	30
70	4	5	5	4	4	4	5	31
71	5	5	5	5	5	5	5	35
72	5	5	5	5	4	4	4	32
73	5	5	5	5	4	4	4	32
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	5	5	5	5	5	4	4	33

77	5	5	5	5	5	5	5	35
78	5	5	5	4	4	4	4	31
79	4	4	4	4	4	4	4	28
80	4	4	4	4	4	4	4	28
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	4	4	4	4	4	4	4	28
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	4	4	5	5	4	4	4	30
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	3	4	4	4	4	4	4	27
89	4	4	4	4	4	4	4	28
90	4	4	4	4	4	4	4	28
91	5	5	5	5	5	5	5	35



**Lampiran 3. Hasil Output Pengujian**

		Umur			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	22-32 tahun	11	12.1	12.1	12.1
	33-37 tahun	24	26.4	26.4	38.5
	38-42 tahun	20	22.0	22.0	60.4
	43-47 tahun	22	24.2	24.2	84.6
	49-52 tahun	14	15.4	15.4	100.0
Total		91	100.0	100.0	

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	77	84.6	84.6	84.6
	Perempuan	14	15.4	15.4	100.0
Total		91	100.0	100.0	

		Jabatan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Bendahara	13	14.3	14.3	14.3
	Kades	13	14.3	14.3	28.6
	Kadus 1	13	14.3	14.3	42.9
	Kadus 2	13	14.3	14.3	57.1
	Kadus 3	13	14.3	14.3	71.4
	Kaur Pern	13	14.3	14.3	85.7
	Sekdes	13	14.3	14.3	100.0
	Total		91	100.0	100.0

		Nama Desa			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Huta Rihit	7	7.7	7.7	7.7
	Janji Marapot	7	7.7	7.7	15.4
	Nainggolan	7	7.7	7.7	23.1
	Pananggangan 1	7	7.7	7.7	30.8
	Pananggangan 2	7	7.7	7.7	38.5
	Pangaloan	7	7.7	7.7	46.2
	Pasaran 1	7	7.7	7.7	53.8
	Pasaran Parsaoran	7	7.7	7.7	61.5
	S. Lumbasiantar	7	7.7	7.7	69.2
	Sibonor Ompuratus	7	7.7	7.7	76.9
	Sipinggan	7	7.7	7.7	84.6
	SUP	7	7.7	7.7	92.3
	Toguan Galung	7	7.7	7.7	100.0
	Total		91	100.0	100.0

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	x1
X1.1	Pearson Correlation	1	.368**	.384**	.507**	.584**	.247**	.717**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X1.2	Pearson Correlation	.368**	1	.305**	.402**	.384**	.376**	.625**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X1.3	Pearson Correlation	.384**	.305**	1	.516**	.476**	.518**	.746**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,003		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X1.4	Pearson Correlation	.507**	.402**	.516**	1	.481**	.428**	.781**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,003		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91

	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X1.5	Pearson Correlation	.584**	.384**	.476**	.481**	1	.401**	.772**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X1.6	Pearson Correlation	.247*	.376**	.518**	.428**	.401**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
x1	Pearson Correlation	.717**	.625**	.746**	.781**	.772**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	91	91	91	91	91	91	91

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	x2
X2.1	Pearson Correlation	1	.550**	.515**	.499**	.434**	.319**	.743**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X2.2	Pearson Correlation	.550**	1	.637**	.456**	.451**	.455**	.779**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X2.3	Pearson Correlation	.515**	.637**	1	.423**	.494**	.582**	.800**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X2.4	Pearson Correlation	.499**	.456**	.423**	1	.436**	.441**	.724**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

	N	91	91	91	91	91	91	91
X2.5	Pearson Correlation	.434**	.451**	.494**	.436**	1	.643**	.752**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
X2.6	Pearson Correlation	.319**	.455**	.582**	.441**	.643**	1	.748**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91
x2	Pearson Correlation	.743**	.779**	.800**	.724**	.752**	.748**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	91	91	91	91	91	91	91

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	y
Y1	Pearson Correlation	1	.583**	.533**	.357**	.503**	.347**	.406**	.758**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91
Y2	Pearson Correlation	.583**	1	.517**	.282**	.468**	.438**	.390**	.737**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91
Y3	Pearson Correlation	.533**	.517**	1	.280**	.530**	.381**	.573**	.764**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,007	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91
Y4	Pearson Correlation	.357**	.282**	.280**	1	.237**	0,133	.489**	.550**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,007	0,007		0,023	0,207	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91

Y5	Pearson Correlation	.503**	.468**	.530**	.237*	1	.553**	.529**	.768**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91
Y6	Pearson Correlation	.347**	.438**	.381**	0,133	.553**	1	.413**	.646**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,000	0,207	0,000		0,000	0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91
Y7	Pearson Correlation	.406**	.390**	.573**	.489**	.529**	.413**	1	.764**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	91	91	91	91	91	91	91	91
Y	Pearson Correlation	.758**	.737**	.764**	.550**	.768**	.646**	.764**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	91	91	91	91	91	91	91	91

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,817	6

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	21,4286	7,114	0,569	0,790
X1.2	21,3407	7,938	0,489	0,807
X1.3	21,2637	6,974	0,608	0,782
X1.4	21,4066	6,644	0,646	0,773
X1.5	21,4176	6,846	0,644	0,774
X1.6	21,3297	7,246	0,528	0,799



**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,850	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	21,2308	7,691	0,600	0,833
X2.2	21,1538	7,821	0,670	0,818
X2.3	21,0659	7,684	0,697	0,813
X2.4	21,2418	7,896	0,582	0,836
X2.5	21,1758	8,035	0,638	0,825
X2.6	21,1648	7,984	0,627	0,826

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,840	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	26,1758	8,302	0,635	0,812
Y2	25,9670	8,743	0,624	0,813
Y3	26,0659	8,684	0,663	0,808
Y4	26,0000	9,689	0,401	0,845
Y5	26,1758	8,480	0,661	0,807
Y6	26,0220	9,288	0,518	0,829
Y7	26,0330	8,410	0,649	0,809

## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

---

Nomor : 628/FEB/A/02.2/B/ VIII /2023 02 Agustus 2023  
 Lamp :  
 Perihal : Izin Research

Kepada Yth,  
**Kantor Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samsir**

Dengan hormat,  
 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

**N a m a** : LITA SITUMORANG  
**NPM** : 198330116  
**Judul** : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samsir

Untuk mengeluarkan surat izin research dari Fakultas yang sedang Bapak / Ibu Pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi/ Perusahaan Bapak /Ibu pimpin.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Inovasi,  
 Kemahasiswaan Dan Alumni



**Rana Fathimah Ananda , SE. M.Si**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiinggal

### Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian

  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**KECAMATAN NAINGGOLAN**  
Jln.Ompu Tara Tunggal No. 03 Kode Pos. 22394

Nainggolan, 26 Juli 2023

Nomor : 414.4/321/KEC-NGL/VII/2023  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada :  
Yth. Rector Universitas Medan Area  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemanusiaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Nomor: 525/FEB/01.1/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Izin Research/Survey yang dilakukan oleh Mahasiswa atas nama :

Nama : Lita Situmorang  
NPM : 198330116  
Program Studi : Akuntansi

Yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Nainggolan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan judul penelitian dan terlaksana dengan baik.

Demikian disampaikan untuk maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih .

**An. CAMAT NAINGGOLAN**  
Sekretaris Kecamatan  
  
**THANTY JUSHEPA SINAGA, SE**  
PENATA TK.I  
NIP. 19760518 200604 2 024

Tembusan :  
1. Bupati dan Wakil Bupati Kab. Samosir di Pangururan ; (Sebagai Laporan)  
2. Kepala DINSOSPMD Kabupaten Samosir ; (Sebagai Laporan)  
3. Pertinggal